

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam hal pendanaan desa sebagai dana operasional pemerintahan desa hal ini disebabkan kepada APBD kabupaten/kota serta dana desa itu sendiri yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dari alokasi khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah : (1) Masyarakat desa, (2) Perangkat desa, (3) Pemerintahan daerah, (4) Pemerintah pusat.

Akuntansi menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari berbagai tahapan tertentu dan selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 siklus akuntansi terdiri dari empat tahap yaitu : Tahap pertama, pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pada tahap awal pengelolaan keuangan desa dilakukan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tahap kedua, transaksi yang timbul dari desa. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan disertai bukti-bukti berupa nota maupun kuitansi. Tahap ketiga, transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan pelaksanaan tersebut dibukukan oleh bendahara desa dengan membuat buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, buku bank dan neraca kas. Tahap terakhir,

pembuatan laporan realisasi anggaran (LRA). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa berupa laporan realisasi anggaran (LRA). Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 berupa : (1) Anggaran, (2) Buku kas, (3) Buku pajak, (4) Buku bank, (5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Akuntansi merupakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari berbagai tahapan tertentu dan selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi keuangan desa adalah setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam daftar transaksi. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data atau dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang kas bendahara. Kemudian dilakukan jurnal umum sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi. Transaksi yang telah dijurnal akan diposting ke buku besar. Buku besar merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan dan untuk mencatat rekening tertentu digunakan Buku Besar Pembantu. Buku besar akan memberikan informasi tentang saldo-saldo setiap akun yang akhirnya dapat disusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Selanjutnya dibuat ayat jurnal penyesuaian agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar serta untuk memperoleh neraca setelah disesuaikan. Neraca setelah disesuaikan adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Kemudian disajikan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang

disajikan dalam laporan keuangan desa yaitu: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Anggaran, Buku kas, Buku pajak, Buku bank, dan Setelah laporan keuangan disajikan, selanjutnya terakhir akan dibuat jurnal penutup.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2009:2) tujuan laporan keuangan adalah:

Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepadanya.

Pelaksanaan akuntansi pada Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut

diharapkan desa memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai sehingga desa mampu mengelola keuangan secara tepat dan mandiri.

Penyusunan laporan keuangan pada Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura Berbasis pada basis kas (*cash basic*). Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan. Sedangkan basis akrual untuk Neraca bahwa Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh kas desa.

Fenomena yang terjadi bahwa akuntansi pada pemerintahan desa belum sepenuhnya memahami akuntansi secara komprehensif, sehingga belum dapat memaksimalkan fungsi akuntansi dalam menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Fenomena pengguna dana tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal menambah pundi-pundi sakunya. Aparatur pemerintah desa dan

masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Proses akuntansi yang dilakukan Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 1), dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan Buku Kas Umum (Lampiran 2). Dalam buku kas umum terdapat kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo. Kemudian membuat Buku Pajak (Lampiran 3), Buku Bank (Lampiran 4), Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 5), Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Lampiran 6), untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 7), dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa (Lampiran 8).

Berdasarkan proses akuntansi selama ini yang dilakukan Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura terdapat permasalahan yaitu tidak membuat jurnal umum serta tidak memposting ke Buku Besar yang merupakan media pencatatan transaksi sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi pada Buku Kas Umum (Lampiran 2). Masalah lain yaitu tidak dilakukannya Penyusutan terhadap Aset Tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 7).

Berdasarkan laporan keuangan Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura sudah lengkap menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik membahas dan menganalisis masalah penerapan akuntansi dengan melakukan penelitian dalam bentuk proposal berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA KAMPUNG BUANA MAKMUR KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada pemerintahan desa Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada penerapan akuntansi pada pemerintahana desa.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Desa, khususnya Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura.
3. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulis membagi kedalam enam bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dari proposal ini menguraikan secara singkat mengenai isi proposal yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam

landasan pembahasan dan pemecahan masalah dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode dan lokasi objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data dan analisi data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai pemerintahan desa, struktur organisasi dan aktivitas yang dijalankan oleh pemerintahan desa.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.